

## Ada Rugi dibalik Kenikmatan Harga Murah Buku Bajakan

(artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas matakuliah Penulisan Opini dan Tajuk Rencana dan *In-depth Reporting*, 2019)

Jika 2019 digemparkan dengan film dokumenter *Sexy Killers* karya Dandhy Laksono, lain halnya pada tahun 2013. Semenjak lengsernya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sebuah buku mengupas tentang masifnya tindak korupsi di Indonesia yang berakar dari kasus Bank Century menjadi topik hangat di segala perbincangan. Dikarang oleh George Julius Aditjondro, buku yang berjudul *Gurita Cikeas* ini menempati peringkat pertama untuk buku yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia pada saat itu.

Masyarakat penasaran dengan bagaimana Aditjondro dalam melaporkan tindakan kejahatan nomor wahid di NKRI. Baik toko buku arus utama maupun kios buku di pinggir jalan, semuanya menjual *Gurita Cikeas*. Harganya pun juga variatif. Sayangnya, variasi harga ini bukanlah fenomena yang baik atau positif. Variasi harga ditentukan oleh kualitas dari buku-buku yang diperjualbelikan, apakah buku- buku tersebut asli atau hanya sekadar *repro*.

*Repro*, kependekan dari reproduksi, adalah istilah yang dihaluskan dari pengkopian atau pembajakan buku. Harga buku yang relatif mahal membuat masyarakat malas mengonsumsi buku. Padahal kebutuhan masyarakat akan buku sama pentingnya dengan kebutuhan akan pangan. Dengan adanya buku *repro*, masyarakat tak perlu mengeluarkan banyak uang dari kantong dan dompetnya untuk mengedukasi diri sendiri. Namun, dibalik keuntungan yang didapatkan produsen dan konsumen buku *repro*, ada pihak yang dirugikan.

Biasanya, penerbit mematok harga buku yang akan didistribusikan ke toko- toko buku pada kisaran Rp20.000 sampai Rp50.000 per eksemplar. Tergantung pada tebal tipisnya buku dan jenis kertas yang digunakan. Mahalnya buku- buku yang dijual di toko buku arus utama, disebabkan oleh sistem tata niaga perbukuan yang mengharuskan distributor dan toko buku untuk menaikkan harga.

Dengan harga patokan awal penerbit tersebut, bisa dibayangkan, sebenarnya berapa besar keuntungan yang diambil oleh penulis?

Jika kita mengonsumsi buku- buku *repro*, lalu darimana penulis bisa mendapat royalti atas buku- buku dikarangnya?

Di Hari Buku Nasional inilah, seharusnya masyarakat disadarkan, bahwa dibalik kemurahan buku- buku *repro*, ada penulis- penulis yang merasa tidak dihargai atas hasil karyanya. Tidak harus dengan sesuatu yang besar. Cukup sesuai dengan kapasitas kita sebagai masyarakat untuk tidak membeli buku bajakan.

Sejauh ini pemerintah belum terlalu menganggap bahwa fenomena buku bajakan ini adalah persoalan yang genting. Buktinya, belum ada Undang- Undang yang secara spesifik membahas tentang perbukuan. Padahal, penerbit dan (tentu saja) penulis membutuhkan perlindungan dari kerugian yang ditimbulkan dari produksi buku *repro*. Selain menyadarkan pemerintah untuk menganggap serius kasus ini, media juga berperan untuk menyadarkan masyarakat, bahwa dibalik itu ada sekelompok masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan haknya.

Sebagai media yang bisa menjadi tuntunan masyarakat, media seperti kami bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat sebagai konsumen buku, penulis, yang tentu saja, sebagai masyarakat, dan pemerintah.

Semua elemen masyarakat sangat perlu untuk bersatu dan memberantas pembajakan buku di negara ini. Peran pemerintah, peran media, kontribusi masyarakat, sangat diperlukan untuk membebaskan penulis dari penghisapan yang dilakukan oleh masyarakat. Sudah seharusnya pula, masyarakat mengubah cara pandangnya dalam mengambil keputusan. Untuk perihal perbukuan, mengubah cara pandang agar tidak selalu berorientasi pada harga, adalah sesuatu yang krusial.

Pemerintah dan masyarakat perlu duduk dalam satu ruangan dan berdiskusi; bagaimana caranya agar penulis mendapatkan hak royaltinya, serta masyarakat tidak terlalu keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh penjual buku?